

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KOMODITAS COKLAT PASCA GEMPA UNTUK MENINGKATKAN PREKONOMIAN MASAYARAKAT DESA TENIGA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu
(S1) studi Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram.



OLEH:

RIKO HADINATA

NIM. 216130025

PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KOMODITAS
COKLAT PASCA GEMPA UNTUK MENINGKATKAN PREKONOMIAN
MASAYARAKAT DESA TENIGA KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN LOMBOK UTARA**



**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

**Telah dipriksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi
Mataram, 14 Februari 2020**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Mintasrihardi, M.H
NIDN. 0830016101**

**Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN. 0816057902**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

**Ayaullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN. 0816057902**

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KOMODITAS
COKLAT PASCA GEMPA UNTUK MENINGKATKAN PREKONOMIAN
MASAYARAKAT DESA TENIGA KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Di Susun Dan Di ajukan Oleh

Riko Hadinata



NIM. 216130025
PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal : 14 Februari 2020 dan
dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

1. Drs. Mintasrihardi, M.H (PU) (.....)
NIDN. 0830016101
2. Ayatullah Hadi., S.IP., M.IP (PP) (.....)
NIDN. 0816057902
3. Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si (PN) (.....)
NIDN. 0806066801

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Dr. H. Muhammad Ali., M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riko Hadinata

Nim : 216130025

Prodi : Studi Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul : “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Komoditas Coklat
Pasca Gempa Untuk Meningkatkan Prekonomian Masyarakat Desa
Tenaga Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara”

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atas kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Mataram, 19 February 2020

Penulis,

Riko Hadinata

MOTTO

**“Man jadda wa jada yang artinya barang siapa yang bersungguh sungguh
maka dapatlah dia”**

(Mahfudzat)

Syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah

Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik

Tuhan pasti kan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya

Bagi hamba-Nya yang sabar dan tak pernah putus asa

(D Masiv)

**“Sesungguhnya Allah itu melihat usaha seseorang, sesuatu yang dikerjakan
karena Allah maka senantiasa Allah mudahkan lalu usaha itu tidak
menghianati hasil”**

**“Takperlu anda memamerkan kebaikan anda yang terpenting tetaplah tebarkan
kebaikan agar Allah membalasnya”**

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu menjadi semangat di setiap langkahku...

- *Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa)*

Atas limpahan berkat dan karunia-Nya hingga bisa sampai ke titik ini.

- *Kedua orangtuaku, Ayah Ridwan Sal dan Ibu Mu'anah dan Sudaraku
Insan Alfarisi Akbar*

Terimakasih atas setiap tetes keringat, air mata dan doa demi cita-cita ini dan kalian adalah penopang dan semangat saatku rapuh.

- *Fathul Arifin, Seri Utama, Nenekku Sarnah dan Sekeluarga*

Terimakasih atas motivasi dan semangatnya

- *Sahabat-sahabatku dunia dan akherat (L F R), Teman Seperjuangan.*

Terimakasih atas dukungan dan canda tawa kalian untukku, kalian penopangku saat aku rapuh, Aku terjatuh dan bangkit lagi.

- *Almamaterku: Universitas Muhammadiyah Mataram.*

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan peran pemerintahan desa dalam pengelolaan komoditas coklat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan komoditas coklat pasca gempa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Teniga dan masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa staf desa dan masyarakat sebanyak Sembilan orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu secara sengaja mengambil sembilan orang informan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Teniga, seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan; sedangkan informan biasa adalah ketua kelompok tani. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Peran pemerintah mencakup pemberian dukungan dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan khusus pada kelompok tani, bantuan bibit bagi petani coklat, pemberian jaminan pemasaran dengan harga yang sesuai dengan harga pasar; 2) Pelatihan dan penyuluhan sangat didukung pemerintah desa dengan mendatangkan pemateri berkaitan dengan pengelolaan komoditas coklat; 3) Peran pemerintah desa termasuk pemberian semangat kepada petani coklat dengan tegur dan sapa ketika bertemu di jalan atau ketika mendatangi sebuah undangan.

Kata kunci: peran, pemerintah desa, pengelolaan, komoditas coklat.

Abstract

The problem in this research is related to the role of village government in managing cocoa commodities to improve the economy of the community of Teniga Village, Tanjung District, North Lombok Regency. The purpose of this study was to determine the role of the village government in managing post-earthquake chocolate commodities to improve the economy of the people of Teniga Village, Tanjung District, North Lombok Regency. This research was conducted at the Teniga Village Office and the community. The population in this study were nine village and community staff of nine people. Sampling in this study was conducted using purposive sampling, which is deliberately taking nine informants. Key informants in this study were the Teniga Village Head, the government section, and the welfare section; while the regular informant is the head of the farmer group. Data collection techniques in this study include observation, interviews, and documentation. Data in this study came from primary and secondary sources. The collected data was analyzed qualitatively. This research uses descriptive qualitative research. The results of this study indicate: 1) The role of the government includes providing support in the form of training and special counseling to farmer groups, seedling assistance for cocoa farmers, marketing guarantees at prices that are in line with market prices; 2) Training and counseling are strongly supported by the village government by bringing speakers related to the management of chocolate commodities; 3) The role of the village government includes giving encouragement to cocoa farmers with reprimand and greeting when meeting on the street or when attending an invitation.

Keywords: role, village government, management, chocolate commodity.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, perlindungan dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *"Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Komoditas Coklat Pasca Gempa Untuk Meningkatkan Prekonomian Masyarakat Desa Teniga Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara"* Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana ilmu pemerintahan pada Jurusan ilmu pemerintahan, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dengan kerendahaan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi. S.IP,.M.IP. Selaku ketua Program Studi ilmu pemerintahan.
4. Bapak Drs. Mintasrihardi, M.H. Selaku Dosen Pembimbing sekaligus sebagai penguji utama skripsi yang juga telah memberikan arahan dan petunjuk dengan sabar dan teliti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ayatullah Hadi. S.IP,.M.IP Selaku Dosen Pembimbing sekaligus sebagai penguji anggota skripsi, yang juga selalu sabar memberikan

bimbingan selama proses konsultasi berlangsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si Selaku Dosen Penguji Netral yang juga selalu sabar memberikan penilaian dan masukan selama proses ujian skripsi berlangsung. Alhamdulillah.
7. Semua Dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu sejak semester I sampai semester akhir, Allah akan membalasnya dengan kebaikan.
8. Kedua orang tuaku (Keluarga besar), teman-teman (teman dekat) seperjuangan yang selalu memebrikan semangat luar biasa sehingga selalu sabar dalam menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaa,oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN.....	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
LEMBAR KEASLIAN	4
MOTTO	5
PERSEMBAHAN.....	6
ABSTRAK	7
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL.....	13
DAFTAR GAMBAR	14
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	15
1.2. Rumusan Masalah	20
1.3. Tujuan Penelitian	20
1.4. Manfaat Penelitian	21
1.4.1. Manfaat Teoritis	21
1.4.2. Manfaat Praktis	21
1.4.3. Manfaat Akademis	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	22
2.2. Kajian Peran Dalam Pemerintahan	29
2.2.1. Teori Peran.....	29
2.2.2. Empat Golongan Dalam Teori Peran	32
2.2.3 Kewajiban (Kewenangan).....	33
2.3. Teori Dan Pengertian Pemerintahan	34

2.3.1. Teori Pemerintahan	34
2.3.2. Tugas Pemerintah.....	35
2.4. Tinjauan Pengelolaan	38
2.4.1. Teori Dan Pengertian Pengelolaan.....	38
2.4.2. Tahapan Pengelolaan	41
2.4.3. Rencana Pengelolaan	45
2.5. Komoditas	46
2.5.1. Konsep Prekonomian Masyarakat.....	47
2.6. Masyarakat	48
2.6.1. Pengertian Masyarakat	48
2.6.2. Ciri-ciri Masyarakat	49
2.6.3. Syarat Fungsional Masyarakat	49
2.7. Kerangka Berpikir	50
2.8. Definisi Konseptual.....	54
2.9. Definisi Oprasional	55
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	56
3.2. Lokasi Penelitian.....	56
3.3. Jenis Dan Sumber Data	57
3.4. Metode Pengumpulan Data	57
3.5. Teknik Penentuan Narasumber	58
3.5. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Lokasi Penelitian	

4.1.1. Letak Geografis Desa Teniga	
4.1.2. Keadaan Penduduk Desa Teniga.....	
4.1.3. Struktur Organisasi Kantor Desa Teniga	
4.2. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Komoditas Coklat Pasca Gempa Untuk Meningkatkan Prekonomian Masyarakat DiDesa Teniga, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.....	
4.2.1. Kewajiban Pemerintah Desa Teniga	
4.2.1.1. Kewenangan Peran Pemerintah Desa Teniga	
4.2.1.2. Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa Teniga	
4.2.2. Norma-Norma Pemerintahan Desa Teniga	
4.2.2.1. Aturan-Aturan Pemerintah Desa Dalam Komoditas Coklat	
4.2.2.2. Harapan-Harapan masyarakat dan Pemerintah Desa	

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

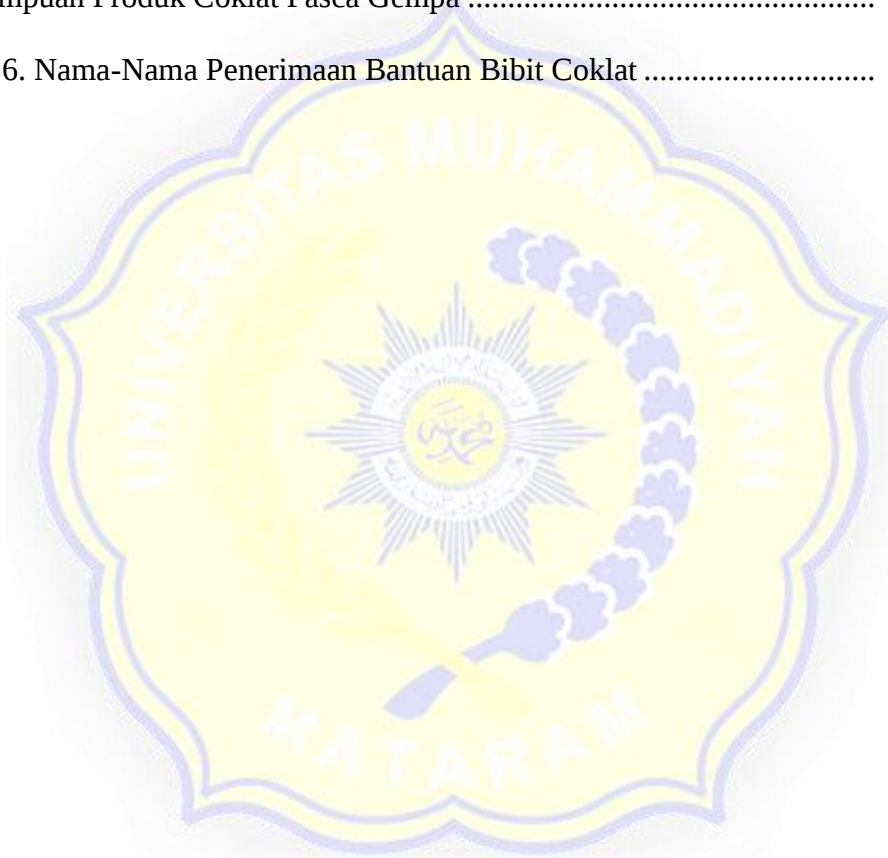
5.1. Kesimpulan	
5.2. Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1. Hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas Sebelum Gempa	
Tabel 2. Daftar Pemilik Lahan Perkebuna Coklat	
Tabel 3. Deskripsi Subsektor Perkebunan Pasca Gempa	
Tabel 4. Penentuan Hasil Besar Nilai Produksi coklat	
Tabel 5. Program Pemerintah Desa Tenaga Dalam Peningkatan Kemampuan Produk Coklat Pasca Gempa	
Table 6. Nama-Nama Penerimaan Bantuan Bibit Coklat	



Daftar Gambar

- Gambar 1. Wawancara Bersama Kepala Desa Teniga.....
- Gambar 2. Wawancarai Seksi Pemerintahan Serta Mewakili Bagian
Kesejahteraan Desa Teniga
- Gambar 3. Wawancarai Ketua Dari Kelompok Tani (Bareng Rempug)
- Gambar 4. Wawancarai Ketua Dari Kelompok Tani (Saling Tulung).....
- Gambar 5. Surat Undangan Terhadap Dinas Pertanian
- Gambar 6. Pelatihan Pada Masayarat Kelompok Tani Dusun Onggong Lauk ...
- Gambar 7. Pelatihan Pada Masayarat Kelompok Tani Di Dusun Mekar
Sari



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 tentang peran pemerintah yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memberikan artinya bahwa pemerintah mempunyai peran sentral dalam pembangunan nasional dalam kesejahteraan rakyat.

Isu utama mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Daerah adalah bagaimana melahirkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam sehingga dapat digunakan untuk memperkuat perekonomian suatu daerah secara optimal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta revisinya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah berdampak luas kepada semakin terbukanya peluang daerah (khususnya Kabupaten dan Kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sesuai yang tertuang dalam undang-undang tersebut.

Kewenangan Daerah yang dimaksud mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan bidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). (Muhammad Amir Solihin dan Rija Sudirja. 2007:15)

Dalam tatanan Sumber Daya Alam (SDA) itu sangat perlu adanya perencanaan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas untuk mencapai kelancaran pendapatan ekonomi masyarakat sehingga dapat dikategorikan sebagai Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dalam artian adanya persiapan dan kesiapan kedepannya. Oleh sebab itu, kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan rehabilitasi Sumber Daya Alam (SDA) merupakan kewenangan pemerintah daerah, kewenangan berupa mengeluarkan izin pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Masyarakat perlunya akan perubahan sosial dari kekurangan menuju kemampuan dalam segi aspek demi tercapainya suatu tujuan sebuah keluarga, perlunya kerjasama yang masyarakat butuhkan yaitu antara pemerintah, entah pemerintah daerah yang atas sampai dengan pemerintah bawahan artinya saling membutuhkan. disebutkan pemerintah dalam kerjasama agar terbentuknya pelayanan atau strateginya pemerintah atau pemerintahan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) yang ada supaya dikatakan masyarakat yang memiliki peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, bisa jadi bentuk adanya kerjasama itu memunculkan pengiriman yang sampe luar negeri sehingga menjadi tingkat tertinggi budidaya Sumber Daya Alam (SDA) yang ada tersebut.

Sektor pertanian merupakan yang mampu bertahan dalam kondisi apapun, termasuk saat krisis ekonomi melanda berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. sektor pertanian ikut berperan penting dalam pemulihan ekonomi di Indonesia, sektor pertanian juga menjadi salah satu komponen

utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu pendekatan pembangunan pertanian adalah melalui kegiatan agribisnis yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan pengembangan usaha ekonomi rakyat yang berkelanjutan, yang dilakukan dalam kerangka otonomi daerah untuk memperkuat perekonomian daerah.

Salah satu produksi pertanian yang cukup strategis adalah tanaman kakao. kakao (*Theobroma cacao* L.) merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan penting yang secara historis pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1560, namun baru menjadi komoditas penting sejak tahun 1951. kemudian pemerintah mulai menaruh perhatian dan mendukung industri kakao pada tahun 1957, yaitu setelah PTP VI berhasil meningkatkan produksi tanaman ini melalui penggunaan bibit unggul Upper Amazon Interclonal Hybrid (Sunanto, 1992). Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia merupakan produsen kakao nomor tiga di dunia dengan produksi 809.583 ton. Dengan produksi sebesar itu, komoditi ini telah menyumbangkan devisa sebesar US \$ 1,4 Miliar pada tahun 2009 yang merupakan prolehan devisa ketiga terbesar disektor perkebunan setelah komoditas kelapa sawit dan karet. Selama tahun 1998 hingga tahun 2011, luas areal perkebunan kakao 9% per tahun. Dari 1,746 juta hektar luas areal perkebunan kakao 94% dikelola oleh rakyat, selebihnya 3.1% dikelola pemerintah dan 2,9% oleh perkebunan besar swasta (Ditjenbun, 2012)

Mengingat strategisnya komoditi kakao, maka banyak Pemerintah Daerah (Pemda) mencanangkan bisnis pertanian kakao sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Namun dari sekian Pemerintah

Daerah(pemda) yang mengarahkan kakao sebagai penggerak perekonomian daerah, tidak banyak memiliki progeram kongkrit dalam pengembangan pertanian kakao. Dapat dikatakan bahwa tidak ada intervensi khusus baik berupa progeram maupun regulasi guna mengaselerasi perkembangan usaha agribisnis kakao didaerah. Kegiatan usaha kakao dibiarkan tumbuh sendiri tanpa ada dukungan yang signifikan dari pemda.

Desa Teniga terletak didaerah perbukitan dengan jalur yang bagus dan penghijauan tanaman maupun pepohonan yang banyak manfaatnya, dengan lingkup masyarakat desa yang sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani atau sebagai pengelola kebun bisa dibilang 70% petani dan 30% pegawai, bahkan sebelum gempa yang melanda lombok 5 Agustus 2018 memiliki perkebunan yang sangat mendukung perekonomian masyarakat desa.

Sebagian besar petani di desa Teniga menanam kakao hanya perkarangan rumahnya saja namun disisi lain ada juga penanamannya dikebun . Aaktivitas bertani kakao bagi sebagian besar petani merupakan usaha tani sampingan setelah bertani pohon jambu mente adapun juga menanam pohon kelapa itu menjadi penghasilan sampingan masyrakat setempat juga, maka hal ini menyebabkan produksi pertanian, khususnya pertanian kakao belum maksimal, padahal harga kakao kering dipasar sekitaran antara Rp 15.000.00 – Rp 20.000.00 /kg.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat untuk membutuhkan penghasilan dari pertanian kakao tersebut untuk meningkatkan prekonomian bagi perorang bahkan pendapatan keluarga. kebanyakan keberadaan masyarakat setempat sangat mendukung pertanian kakao ini, karena dengan

dari hasil penanaman sampai penjualan bisa secara lebih atau bisa menambah manajemen ekonomi bagi masyarakat, manajemen ekonomi yang dimaksud adalah adanya penghasilan dari sebuah pekerjaan yang kemudian hasilnya itu akan dibagi dengan membentuk penghasilan yang lain salah satu contohnya masyarakat desa teniga memiliki hasil dari penjualan biji kakao yang sudah diproses lalu dengan penghasilnya itu mereka dapat membagi hasil dengan manajemen ekonomi yaitu dengan berdagang yang bermodalan dari hasil penjualan kakao tersebut.

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Teniga menempuh dan merasakan, bahkan tidak terlalu panik masyarakat setempat khususnya di desa dan umumnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU) digoncangkan Karena gempa, semulanya semangat yang luar biasa dialami oleh masyarakat setempat sampai-sampai masalah perekonomian untuk dirinya sendiri sudah diluar kebiasaan, artinya perekonomiannya lancar, terutama karena ada perkebunan coklat tersebut.

Selain dari kebijakan dari desa untuk masyarakat setempat dalam hal peningkatan perekonomian di sisi lain penduduknya kurang menikmati kebijakan dari Pemerintah Desa (PEMDES) untuk masyarakat mengenai peningkatan atau kepartisipasiannya terhadap perkebunan coklat, untuk pengelolaan dan memelihara agar menjadi perkebunan yang berkelanjutan demi terlaksananya peningkatan perekonomian masyarakat desa Teniga tersebut, Sekarang pasca gempa masyarakat kurang menikmati untuk perkebunan coklat dikarenakan alih profesi menjadi tukang, itu sebabnya yang sebelumnya etos untuk perkebunan coklat menjadi turun. dengan begitu jelas

bahwa berkurangnya minat masyarakat untuk perkebunan coklat saat ini, dan menjadi jadi pengempul menanyakan kekurangan tersebut, untuk itu ketika peran pemerintah dalam artian masyarakat sudah menerima kemudahan-kemudahan dari pemerintah untuk pengelolaan komoditas coklat dengan berbagai proses pengelolaan yang di lalui oleh petani coklat atau kakao.

Maka oleh sebab itu peneliti sangat tertarik mengangkat judul tentang *“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Komoditas Coklat Pasca Gempa Untuk Meningkatkan Prekonomian Masyarakat Desa Teniga Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara”*. Alasannya, karena kurangnya peran (strategi) Pemerintah Desa (PEMDES) dalam pengelolaan komoditas Coklat, dalam hal itu masyarakat di desa kurang pekerjaan bahkan pengangguran sehingga prekonomian sangat sangat rendah, dalam artian perannya pemerintah untuk menggerakkan masyarakat setempat untuk lebih antusias dalam pengelolaan perkebunan coklat setelah gempa terjadi pada 5 Agustus 2018, demi mengangkat suatu perekonomian bagi masyarakat di Desa Teniga.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah peran pemerintahan Desa dalam pengelolaan komoditas coklat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Teniga Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan komoditas coklat demi mengangkat perekonomian masyarakat Di Desa Teniga Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian atau referensi bagi peneliti agar lebih mengetahui, memahami, menambah wawasan pengetahuan perbendaharaan usaha tani terutama coklat, lalu sebagai acuan atau pertimbangan bagi peneliti sejenis.

1.4.2. Manfaat Praktis.

Sebagai masukan strategis serta alternatif dalam tanaman budidaya dan pengembangan pertanian coklat yang sudah ada di Desa Teniga.

1.4.3. Manfaat Akademis

Sebagai Persyaratan akademis guna menyelesaikan studi trata 1 (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram yang tercinta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal, artikel, skripsi dan lain sebagainya yang dimana adanya penelusuran terhadap studi karya-karya terdahulu yang berdekatan atau berkaitan topiknya dengan penelitian yang dilakukan untuk menghindari duplikasi, plagiasi, menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Berikut ini terdapat penelitian terdahulu berupa jurnal yang dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul/Metodelogi	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Darmansyah, Muhammad Yusuf Badjido, Ahsan Samad. (2014)	<i>Peran Pemerintah Desa Dalam Pemebrdayaan Masyarakat Petani Kakao Di Desa Kayuangan Kecamatan Malunda Kabupaten Majane (Kualitatif)</i>	Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Kayuangan mendeskripsikan bahwa bebrpa kendala yang sangat urjen yaitu : Tingkat pola pikir masyarakat masih sangata rendah mengingat tingkat pendidikan dan pengetahuan hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama (SMP), kondisi geogerafis belum memungkinkan dalam mendistribusiakan logistik pertanian sehingga menjadi kendala besar saat ini, tenaga penyuluh belum memadai sehingga masih ada tenaga penyuluh yang merangkap	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saya adalah sama sama menggunakan jenis penelitian deskriptif atau kualitatif, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data. perbedaannya terdapat pada tujuan, rumusan masalah dan adanya kuantitatif.

			jabatan lebih dari satu desa.	
2.	Siti Yuliaty Chansa Arfah, Harianto, Suharno. (2017)	<i>Daya Saing Dan Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Komoditi Kakao Di Sulawesi Tengah</i> (Kualitatif)	Berdasarkan hasil analisis, pemerintah belum memberikan proteksi terhadap harga biji kakao dalam negeri melalui harga referensi biji kakao sehingga harga biji kakao didaerah penelitian masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Sementara terhadap input, pemerintah telah memberikan kebijakan subsidi kepada petani, namun implementasinya masih perlu perbaikan terutama terkait penyaluran dan pengelolaan bantuan agar merata. Kajian ini merekomendasikan masih diperlukan kebijakan pemerintah baik terhadap input maupun output untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi dan menaikkan harga jual biji kakao, sehingga dapat meningkatkan daya saing biji kakao.	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saya adalah sama sama menggunakan Data primer berasal dari observasi, wawancara dan kuesioner. sementara data sekunder berasal dari instansi terkait, Perbedaannya terdapat pada Metode analisis menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) dan analisis sensitivitas.

3	Ahmar, Mappamiring, Anwar Parawangi Jurnal, 2016, Unismuh Makasar.	<i>Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpani Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur (kualitatif)</i>	Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian tersebut: 1. bahwa para pemerintah dalam pemberdayaan petani padi di desa Parumpania sudah berjalan meskipun sepenuhnya belum efektif. 2. Petani masih merasakan adanya kendala dari bantuan yang diterima terutama bantuan bibit dan pupuk yang dianggap bisa meningkatkan produksi lahan pertanian 3. Menunjukkan bahwa belum adanya upaya pemerintahan mendapat bibit yang unggul dan ramah lingkungan yang terjangkau bagi masyarakat sesuai kondisi lahan pertanian di Desa Parumpania sehingga meningkatkan produksi pertanian masyarakat	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saya adalah Pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, wawancara dan observasi. Perbedaannya terdapat pada tipe Fenomenologis
4	Theresia Octastefani, Bayu Mitra Adhyatma Kusuma,	<i>Peran Pemerintah Kab. Malang Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pariwisata (Jurnal, 2015.Kualitatif)</i>	Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian tersebut : 1. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, pemerintah Kab. Malang telah menjalankan perannya sebagai <i>entrepreneur</i>, koordinasi, fasilitator dan stimulator dengan semaksimal mungkin untuk mamapu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. 2. Meskipun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada kendala atau hambatan yang harus dihadapi dalam memainkan peranan pemerinatah daerah tersebut.	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekrang adalah Menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan Deskriptif , Perbedaannya terdapat pada dengan analisa data intraktif Miles dan Huberman
5	Reinaldo Rumlus, Johny Lumolos, Michael Mantiri. (2014)	<i>Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu</i>	Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian tersebut: 1. Permasalahan mengenai	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekrang adalah Penelitian ini

		<i>Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat). (Kualitatif)</i>	penberdayaan masyarakat diantaranya Pemberian bantuan yang kurang memadai, pemberdayaan yang pernah di lakukan tidak di rasakan sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelompok nelayan, pemberdayaan belum di lakukan selama masa kepemimpinan kepala desa yang sekarang dan pemberdayaan yang di lakukan kepala desa lama tidak tepat sasaran juga tidak maksimal; 2. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa trikora tersebut akibat dari berbagai faktor, diantaranya faktor kurangnya pengentahuan tentang pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah, kurangnya kontroling dari pemerintah daerah, kurangnya pembinaan yang diberikan untuk pemerintah desa, Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan yang masih kurang, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam mengembangkan usaha perikanan yang lebih modern, serta modal usaha yang tidak didukung penuh; 3. Peran pemerintah desa yang kurang memadai, dikarnakan tupoksi dari pada kader-kader desa yang tidak diketahui, tidak adanya pembinaan dari pemerintah daerah kepada kader-kader desa, tunjangan yang tidak memadai; 4. Dalam penyelesaian masalah yang ada pemerintah desa trikora menggunakan dua langkah penyelesaian yaitu secara kekeluargaan dan secara hukum. Tetapi untuk penyelesaian masalah pemberdayaan masyarakat pemerintah desa trikora harus menggunakan cara lain yaitu dengan cara	menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan. Data diperoleh dengan wawancara yang berjumlah sebanyak 10 orang. Perbedaannya terdapat pada wawancara yang berjumlah sebanyak 10 sedangkan saya yaitu +/- 15 orang.
--	--	---	---	--

			melakukan dan menjalankan program pemberdayaan karena kalau memakai cara penyelesaian masalah yang sering di pakai oleh desa tidak akan mempan dan masalah ini tidak akan pernah selesai. Pemerintah desa pernah mencoba memakai penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan tetapi tidak berhasil jadi pemerintah desa memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara program – program harus di jalankan	
--	--	--	--	--

Sumber: jurnal/articel.

Penelitian yang berkaitan dengan Peran Pemerintah terhadap komoditas Coklat atau kakao sudah banyak dilakukan, salah satunya dilakukan oleh Darmansyah, Muhammad Yusuf Badjido, Ahsan Samad. (2014), berjudul “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao Di Desa Kayuangan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene*”. Berdasarkan hasil penelitian yang ada di Desa Kayuangan mendeskripsikan bahwa beberapa kendala yang sangat urgen yaitu : Tingkat pola pikir masyarakat masih sangat rendah mengingat tingkat pendidikan dan pengetahuan hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama (SMP), kondisi geografis belum memungkinkan dalam mendistribusikan logistik pertanian sehingga menjadi kendala besar saat ini, tenaga penyuluh belum memadai sehingga masih ada tenaga penyuluh yang merangkap jabatan lebih dari satu desa. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saya adalah sama sama menggunakan jenis penelitian deskriptif atau kualitatif, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data. perbedaannya terdapat pada tujuan, rumusan masalah dan adanya kuantitatif.

Siti Yuliaty Chansa Arfah, Harianto, Suharno, (2017). *“Daya Saing Dan Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Komoditi Kakao Di Sulawesi Tengah”*. Berdasarkan hasil analisis, pemerintah belum memberikan proteksi terhadap harga biji kakao dalam negeri melalui harga referensi biji kakao sehingga harga biji kakao di daerah penelitian masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Sementara terhadap input, pemerintah telah memberikan kebijakan subsidi kepada petani, namun implementasinya masih perlu perbaikan terutama terkait penyaluran dan pengelolaan bantuan agar merata. Kajian ini merekomendasikan masih diperlukan kebijakan pemerintah baik terhadap input maupun output untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi dan menaikkan harga jual biji kakao, sehingga dapat meningkatkan daya saing biji kakao. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saya adalah sama sama menggunakan Data primer berasal dari observasi, wawancara dan kuesioner. sementara data sekunder berasal dari instansi terkait. Perbedaannya terdapat pada Metode analisis menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) dan analisis sensitivitas.

Ahmar, Mappamiring, Anwar Parawangi Jurnal, 2016, Unismuh Makasar, *“Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpani Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur”*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian tersebut: bahwa para pemerintah dalam pemberdayaan petani padi di desa Parumpania sudah berjalan meskipun sepenuhnya belum efektif. Petani masih merasakan adanya kendala dari bantuan yang diterima terutama bantuan bibit dan pupuk yang dianggap bisa meningkatkan produksi lahan pertanian. Menunjukkan bahwa belum adanya upaya pemerintahan mendapat bibit yang

unggul dan ramah lingkungan yang terjangkau bagi masyarakat sesuai kondisi lahan pertanian di Desa Parumpania sehingga meningkatkan produksi pertanian masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saya adalah Pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, wawancara dan observasi. Perbedaannya terdapat pada tipe Fenomenologis.

Theresia Octastefani, Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, Jurnal, 2015. "*Peran Pemerintah Kab. Malang Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pariwisata*". Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian tersebut :Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, pemerintah Kab. Malang telah menjalankan perannya sebagai *entrepreneur*, koordinasi, fasilitator dan stimulator dengan semaksimal mungkin untuk mampu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Meskipun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada kendala atau hambatan yang harus dihadapi dalam memainkan peranan pemerintah daerah tersebut. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saya adalah Menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan Deskriptif, Perbedaannya terdapat pada dengan analisa data intraktif Miles dan Huberman.

Reinaldo Rumlus, Johny Lumolos, Michael Mantiri. "*Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat)". Berdasarkan penelitian yang dilakukan kesimpulannya adalah Permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat diantaranya Pemberian bantuan yang kurang memadai, pemberdayaan yang pernah dilakukan tidak dirasakan sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelompok nelayan, pemberdayaan belum di

lakukan selama masa kepemimpinan kepala desa yang sekarang dan pemberdayaan yang di lakukan kepala desa lama tidak tepat sasaran juga tidak maksimal. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saya adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan. Data diperoleh dengan wawancara yang berjumlah sebanyak 10 orang. Perbedaannya terdapat pada wawancara yang berjumlah sebanyak 10 sedangkan penelitian saya yaitu +- 15 orang.

2.2. Kajian Peran dalam pemerintahan

2.2.1. Teori Peran

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora sering digunakan menggambarkan teori peran.

Menurut Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut teori diatas, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan daripadanya titik berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang aktor tersebut. pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak mumpuni “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat. Bahkan dalam hal itu sesuai pemikirannya untuk melalui sebuah permasalahan.

Menurut teori yang ada bahwa, “Peran lebih banyak menunjukan suatu Fungsi, penyusaiian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan”(Soekanto, 1987:221).

Lebih lanjut Soekanto (1987:221). mengemukakan Aspek-Aspek peranan sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- b. peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2001:267). Teori yang mendukung penelitian ini adalah *role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Khantz dan Khan yang dikutip dibuku sosiologi sebagai pengantar. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba untuk menjelaskan intraksi antara individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisional dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan setatus keadaannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi situasi sosial.

Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian secara umum, dimana peneliti akan melihat sejauhmana peran dari pemerintah dalam pengelolaan komoditas coklat pasca gempa untuk meningkatkan prekonomian masyarakat Desa Teniga Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, berdasarkan teori peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam setatus tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti kaedah-kaedah atau peraturan tertentu, baik itu nilai moral maupun lainnya, yang didasari keinginan-keinginan masyarakat setempat.

2.2.2. Empat Golongan Dalam Teori Peran.

Biddle dan Thomas, dalam Sarwono (2015:215), membagi peristilahan dalam teori peran maka ada empat golongan Yaitu :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam intraksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. kaitan antara orang dan perilaku.

Peneliti dapat memeberikan hasil berdasarkan pemaparan dari pada toeri peran, yang dimana akan menjelaskan secara terperinci sesuai permasalahan yang diangkat oleh peneiliti. Maka peran adalah bentuk dari sebuah pertanggungjawaban atas hal yang ditetapkan padanya dala mencapai sebuah tujuan. didalam peran banyak sekali karakter-karakter yang dipegang untuk mencapai sebuah tujuan yang satu dengan yang lain, salah satunya yaitu peran lembaga atau peran dalam rana sosial tentunya mendukung keberadaanya.

Salah satunya itu adalah peran pemerintah, entah pemerintah daerah atau pemerintah desa.

Pemerintah adalah sebuah lembaga yang mengatur dan mengurus tatanan sistem sosial tersebut, baik dalam sistem sumber daya alam yang meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. yang lebih jelasnya adalah adanya strategi oleh Pemerintah Desa (PEMDES) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dari pada pengelolaan komoditas coklat (Kakao), maka dalam hal itu Pemerintah Desa (PEMDES) lebih memiliki perannya agar bentuk dari kewajiban atas masyarakat setempat bisa terleakaskan agar bisa memudahkan masyarakat untuk mencapai kesejahterannya.

2.2.3. Kewajiban (Kewenangan)

Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, Kewenangan lebih baik pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu (Sutoro Eko, 2014:16).

Pada dasarnya ada 3 kewenangan yang diberikan pada Desa dalam Pemerintah Desa (PEMDES) yaitu.

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan-kewenangan yang diberikan pemerintah.

2.3. Teori dan Pengertian Pemerintah

2.3.1. Teori Pemerintah.

(Menurut Soemendar, 1985:1) “Pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntunan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komonikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat serta legimitasi”

Dari pemaparan Soemendar tersebut peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya diberikan pemahaman tertentu, yaitu pemerintah berdasarkan jabatan maka yang perlu dilihat olehnya adalah keadaan masyarakat setempat, dengan begitu akan menjadi kuatlah rana pemerintahannya, terutama dalam sisi ekonomi untuk memeberikan perkembangan pendapatan sehingga bisa memenuhi kebutuhuna pangan, papan dan sandang.

(Menurut W.S. Sayre, 1960:) “*Government is best the organized agency of the state, expressing and exercing its authority*. Maksudnya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan.

(Menurut Samuel Edward Finer, 1974: 3-4) “Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat. Berdasarkan teori tersebut sudah jelas bahwa segala bentuk yang ada pada

pemerintahan haruslah memiliki tahapan-tahapan untuk menuju tujuannya.
(Drs. H. Inu Kencana Syafii, M.si., Drs. Andi Azikin, M.si. 2007)

2.3.2. Tugas Pemerintah

(Menurut Prajudi Atmosudirdjo, 1984:19) menurutnya ada beberapa tugas dari seorang pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Tata usaha negara.
- b. Rumah tangga negara
- c. pemerintahan
- d. pembangunan
- e. pelestarian lingkungan hidup
- f. Pengaturan
- g. Pembinaan masyarakat
- h. Kepolisian
- i. dan Peradilan.

(Menurut Kitab Suci Al-Quraan, 3:104) “(Pemerintah adalah) segolongan ummat yang mengajak pada kebaikan, mengajak pada kebenaran, melarang dari hal buruk, itulah orang yang beruntung.

Maksudnya adalah antara kebenaran dan kebaikan harus diseimbangkan (*wasathan, balancing, evenwichtighed*. Minsalnya karena ada pemerintah yang baik (*good governance*) malah melindungi pedagang kaki lima berjualan dijalan protokol sehingga kotor, sedangkan pemerintah yang benar dalam pemebrsihannya (*clean governmant*) mengusir pedagang kaki lima dari jalan protokol sehingga dzalim dan menimbulkan keresahan. Untuk melarang dari hal yang buruk pemerintah harus mempunyai kekuasaan dan kekuatan,

sehingga dibentuklah kepolisian, kejaksaan dan lembaga permasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengajak pada kebaikan (*amarmakruf*) untuk melindungi fakir miskin dibentuklah dinas sosial, departemen agama, dan lain lain, yang dimaksud dengan mencegah dari keburukan (*nahimungkar*) adalah kemampuan pemerintah untuk mengantisipasi perjudian, pelacuran, pencurian, dan dekadensi moral lainnya (Drs. H. Inu Kencana, M.si, Drs. Andi Azikin, M.si. 2007)

Maka tidak lain adalah setiap pemerintah maupun pemerintahan tidak terlepas dari kerja sama, dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan kebaikan dalam masa kepemimpinannya, yaitu mencegah dari keburukan dan memperbanyak kebaikan, oleh sebab itu sudah menjadi kebenaran bahwa pemerintah ini melakukan peningkatan untuk perekonomian masyarakat dalam artian mendorong dan mendukung kerjasama pada masyarakat untuk mencapai perubahan ekonomi, yaitu dengan meningkatkan pendapatan untuk belanja masyarakat.

Pemerintah dan Pemerintahan, dua kata yang berbeda namun sama sama saling mendukung dan berkaitan yang sebelumnya berawal dari sistem demokrasi, demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, kemudian kembali pada rakyat, lalu pada dasarnya ketika sebagai pemerintah berarti sudah menjadi yang mengurus, yang mengomando, yang bertanggung jawab artinya itu ketika ada pengembangan sesuatu atau bentuk dari sebuah pengelolaan entah pemberdayaan masyarakat atau pemberdaya smber daya alam yang ada maka udah barang tentu pemerintah itu berpartisipasi atau keikutsertaan dalam membangunnya.

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. (Inu Kencana Syafii. 2010:hal-)

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsidi dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Aristoteles (sebagai murid dan penerus pemikiran plato) yang pertama membuat klasifikasi bentuk pemerintahan. kriteria atau dasar penilaian yang digunakan adalah:

- a. Jumlah orang yang berkuasa (Duduk dalam pemerintahan)
- b. Cara dan kepentingan dalam menjalankan kekuasaan pemerintah

Mengenai jumlah orang yang berkuasa atau memegang tampuk pemerintahan, terdapat tiga macam pembagian, yaitu pemerintahan oleh satu orang (*government by one*), pemerintahan oleh sekelompok orang (*government by few*), dan pemerintahan oleh banyak orang (*government by the many*), masing-masing dari tiga macam pembagian itu diberi klasifikasi antara bentuk yang baik (positif) dengan bentuk yang buruk (Negatif). Sehingga seluruhnya terdapat enam bentuk pemerintahan.

Hal baik atau buruknya suatu pemerintahan, ditunjukkan dari segi cara dan kepentingan dalam menjalankan pemerintahan, jika pemerintahan itu dijalankan dengan diabdikan untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, maka disebut sebagai bentuk baik. Sebaliknya jika diabdikan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok maka disebut buruk.

Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa pemerintahan itu seperti apa dan untuk apa, seringkali ketika sebagai masyarakat banyak yang perlu dibangun atau aspirasi dari masyarakat demi kenyamanan dan keamanan bersama, maka dari itu sebagai pemerintahan haruslah melihat bentuk kepentingan-kepentingan untuk masyarakat banyak, dan suatu pemerintah atau jabatan akan memiliki arti dan nilai tersendiri ketika masa menjadi pemimpin.

2.4. Tinjauan Pengelolaan

2.4.1. Teori dan pengertian Pengelolaan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Daryanto dalam Turyono. 2015. h.7)

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan

suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya (Suharsimi arikunta. 1998)

Maka usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan melakuaknya secara lebih baik, yang dimana hal ini dari teori tersebut tidak terlepas dari perencanaan, oleh sebab itu dibentuklah rencana yang bisa diatur oleh pemerintah maupun masyarakat setempat, namun ketika beranjak pada pemerintah yang ikut kesertaan dalam pengelolaan potensi ini (Coklat) sudah menjadi keharusan untuk berpran.

Menurut George R. Terry, (1999 tanpa halaman) Pengelolaan (manajemen) adalah suatu proses tertentu yang akan dilaksanakan mulai dari perencanaan sampai dengan menilai (evaluasi). Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai satu tujuan. Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melakukan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”

Berdasarkan bebrpa pendapat ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material yang ada dan fasilitas yang ada untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

Berbicara pengelolaan maka tentu masuk pada pembahasan mengenai cara dan sebagainya, menurut peneliti lebih lanjut pengelolaan itu sendiri adalah bentuk proses yang dilewati dengan berbagai cara, dengan berbagai pemikiran sampe dengan pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan. Maka dengan itu peran Pemerintah Desa (PEMDES) sangat dibutuhkan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada salah satunya hasil perkebunan atau hasil dari pertanian yaitu coklat (Kakao) dalam pertanian tentu tidak terlepas dari adanya bentuk pendorong dari pemerintah dalam kaitanya dengan hal ini adalah pendorongan dari pemerintah untuk pengelolaan pertanian coklat dan tidak juga terlepas dari pencapaian tujuan, pencapaian yang dimaksud adalah meningkatkan prekonomian masyarkat dengan begitu pemerintah lebih mudah dalam menjalankan sistem kepemimpinannya dan menanamkan sisi politiknya yaitu bisa melakukan kepemimpinan selanjutnya.

Lanjut menurut Oey Liang Lee (dalam Ranupandojo, 1996:3) Mendefenisikan bahwa, “Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan barang-barang (terutama manusia) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam organisasai untuk mencapai tujuan yang hendak

dicapai. Seperti Sumber Daya Alam (SDA) yang akan menjadi tolak ukur yang lebih untuk pengelolaan bagi masyarakat.

2.4.2. Ada Beberapa Tahapan Ketika Berbicara Pengelolaan Atau Dalam

Bidang Manajemen Yaitu :

1. perencanaan

Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dibuat untuk mengantisipasi segala hal yang akan mengganggu atau menghalangi pencapaian tujuan, hal ini dikarenakan banyak faktor yang akan berubah dengan cepat pada masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perencanaan yang baik akan membuat setiap kesempatan yang ada dapat di manfaatkan dengan baik pula.

Perencanaan dalam arti luas menurut Adisasmita (2011:22) adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya Ranupandojo (1996:11) mendefinisikan perencanaan ialah pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan mengerjakannya dan bagaimana mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, yang dimaksud perencanaan dalam penelitian ini adalah proses persiapan secara sistematis dalam melaksanakan suatu kegiatan, yang diawali dengan proses pengambilan keputusan tentang, apa yang akan

dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana cara menentukan tingkat keberhasilan yang akan ditetapkan.

Pada umumnya menurut Ranupandojo (1996:21) terdapat tujuh prinsip dan petunjuk untuk menyusun perencanaan yang baik adalah sebagai berikut:

a. Rencana harus memiliki tujuan yang khas.

ini penting sebab dengan tujuan yang khas semua kegiatan diarahkan untuk mencapai hasil perencanaan tersebut. Tujuan harus jelas dan mudah dipahami oleh semua orang yang akan melakukan rencana itu.

b. Ada kegiatan yang diprioritaskan

Suatu rencana tanpa ada kegiatan pelaksanaan, tak lebih dari selembar kertas yang tak berarti. Karena kegiatan mencapai tujuan dari satu rencana banyak macamnya, dan disisi lain terdapat faktor-faktor pembatas, maka perlu ada kegiatan yang diberi prioritas. Kegiatan ini bisa disebut sebagai kegiatan kunci, tanpa kegiatan kunci tidak ada jaminan bahwa pelaksanaan rencana akan berjalan secara efektif dan efisien.

c. Melibatkan semua orang

Hendaknya semua orang dilibatkan dalam pembuatan rencana, baik untuk seluruh tahapan, maupun hanya tahap-tahap tertentu dari proses perencanaan tersebut. Keterlibatan ini akan menimbulkan rasa bertanggung jawab dalam tahap pelaksanaan rencana nantinya. Dengan cara ini pelaksanaan rencana diharapkan dapat berjalan lancar, komunikasi lancar dan koordinasi juga lancar.

- d. Perencanaan hendaknya telah diperhitungkan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya.

Seperti pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengendalian. Hal ini penting sebab perencanaan memang merupakan fungsi yang mendahului kegiatan manajemen lainnya, sehingga rencana selalu memiliki sifat sebagai acuan dari fungsi manajemen lainnya.

- e. Rencanan harus selalu diperbaiki, Karena situasi dan kondisi memang selalu berubah.

Perbaikan suatu rencana bukan berarti rencan itu salah tapi untuk menyesuaikan pada perkembangan ssituasi dan kondisi yang ada, namun demikian suatu rencana jangan terlalu sering diperbaiki, sebab jika demikian, rencana tersebut akan sukar untuk dijadikan pedoman, baik dalam pelekasanaanya maupun untuk kepentingan pengendalian.

- f. Penanggung jawab perencanaan.

Perlu ditunjuk orang atau staff khusus yang bertanggung jawab dalam penyusunan rencana. Walaupun banyak orang yang terlibat dalam penyusunan rencana, namun harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap hasil perencanaan tersebut.

- g. semua perencanaan selalu bersifat tentatif dan bersifat interim.

Rencana tidak ada yang bersifat final, sebab rencana yang baik harus memiliki keluwesan terhadap perubahan perubahan yang ada.

Perinsip-perinsip perencanaan diatas, pada penelitian ini akan digunakan sebagai landasan dalam mengajukan wawancara guna mengetahui proses perencanaan yang dilakuakn dalam pengelolaan

sumber-sumber pendapatan terutama terhadap komoditas coklat yang ada pada masyarakat.

2. Pelaksanaan.

Tjokroadmudjoyo (dalam Adisasmita, 2011:24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan.

Selanjutnya Westra, dkk (dalam Adisasmita, 2011:24) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Perlunya pelaksanaan terhadap suatu rencana agar terjamin pengelolaan secara baik demi mencapai tujuan salah satunya dari peneliti yaitu komoditas coklat untuk mengangkat prekonomian masyarakat yang diman dari inisiatif atau kebijakan-kebijakan seorang pemerintah atau Pemerintah Desa (PEMDES) yang harus begitu berperan.

3. Pengawasan

Pengawasan atau pengendalian diperlukan untuk menjamin bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan semestinya dan juga menilai apakah menyimpang atau sesuai dengan rencana. Menurut Siswanto (2009:139) pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan dapat dicapai, dan apabila tidak dapat dicapai maka dicari faktor penyebabnya. Penemuan faktor penyebab ini berguna untuk melakukan tindakan perbaikan (corrective action).

Sujamto (dalam Adisasmita, 2011:25) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan kenyataan yang sebenarnya dan semestinya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ranupandojo (1996:169) yang menyatakan bahwa pengendalian merupakan perbandingan antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, membuat koreksi-koreksi jika pelaksanaan berbeda atau menyimpang dari rencana.

Berdasarkan teori-teori dari para ahli diatas maka yang dimaksud dengan pengawasan dala penelitian ini adalah usaha dalam menilai kenyataan yang telah dilakukan dalam peroses pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya akan dibuat perbaikan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan.

2.4.3. Rencana Pengelolaan

Berdasarkan adanya rencana pengelolaan maka perlunya membentuk beberapa tahapan agar rencana yang dicapai itu terlaksana sesuai pengelolaan yang semstinya, diantaranya adalah sebagi berikut :

- a. Organisasi pengelola
- b. Kebutuhan tenaga kerja
- c. Metode Kerja
- d. Spasifikasi bahan dan alat
- e. sekedul pengelolaan
- f. Kebutuhan anggaran biaya

2.5. Komoditas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (F. Rahardi, 2004), Komoditas adalah:

- a. Barang dagangan utama, benda niaga, hasil bumi dan kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor.
- b. Bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan setandar perdagangan internasional

Segala yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) bisa berkaitan dengan komoditas, karena hal itu bersifat umum, namun disisi lain yang membedakanya itu adalah bentuk dari pengolahan itu sendiri dan termasuk seperti itu. bahkan berpotensi sangat besar sekali ketika komoditas (adanya hasil bumi) bisa diolah dan dikelola oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan prekonomian baik untuk pendapat perhari maupun perbulan demi bisa bertahan hidup dipedesaan. Terutama keberadaan Desa Teniga, kecamatan tanjung kabupaten lombok utara yang sangat minat dalam pemeliharaan pohon coklat, namun disisi lain terdapat beberapa hasil lainnya seperti jambu mente dan kelapa, 3 (tiga) pendapatan sumber daya alam bisa

berpotensi lebih besar lagi hasilnya ketika ada pengolahan untuk sisi penjualannya maka bisa dikatakan sebagai keluarnya dari kemiskinan.

2.5.1. Konsep Prekonomian Masyarakat.

Dalam suatu daerah yang tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan yang ada, baik dari segi ekonomi, pekerjaan, hasil sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia untuk menjadi peningkatan pada suatu daerah tersebut, dengan satu tujuan untuk memberikan hasil yang bermutu. Dalam dasar ini peran, sebuah lembaga, dan bentuk pengelolaan salah satunya perencanaan yang perlu diterapkan untuk bisa menumbuhkan rasa kesadaran bagi masyarakat entah pada perkotaan atau pedesaan. Berbagai konsep yang dimiliki masyarakat untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada didalam daerah tersebut, dalam proposal ini, penulis mengkaitkan bentuk secara umum konsep-konsep yang harus dijalani oleh masyarakat dalam sisi ekonomi yang berkaitan dengan judul untuk beberapa variabel, *“Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Komoditas Coklat Pasca Gempa Untuk Meningkatkan Prekonomian Masyarakat”*

- a. Mengetahui strategi peran pemerintah secara umum, tentang strategi untuk pemberdayaan atau pengelolaan secara terpadu untuk peningkatan ekonomi masyarakat, seperti adanya program kelompok tani dan lain sebagainya.
- b. Mengadakan perencanaan bersifat keberlanjutan, artinya sebuah perencanaan yang bisa menumbuhkan produktifitas lain dalam mencapai peningkatan terus menerus namun dengan tahapan awal hingga akhir.

- c. Melakukan langsung kerja lapangan sesuai perencanaan umum tersebut, Guna ada kesadaran dan memiliki semangat mencapai penghasilan yang optimal namun dibalik itu ada etos dari pemerintah.

2.6. Masyarakat

2.6.1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah satu kesatuan yang selalau berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui intraksi yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai sehingga saling mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan masyarakat (Soetomo, 2009)

Masyarakat pada umumnya bisa berkelompok dan berindividu hanya saja setiap masyarakat mempunyai haknya masing-masing namun tidak terlepas dari aturan yang ada kemudian tidak terlepas dari pemberdayaan sumber daya-sumber daya yang ada, karena prinsip masyarakat atau penduduk itu adalah selalu bertahan hidup bisa menafkahi dan pekerjaan. dalam sisi lain tergantung terhadap kondisi atau letak strategis wilayah tersebut, jika merujuk pada pemanfaatan sumber daya-sumber daya untuk meningkatkan prekonomian, maka masyarakat bisa kerjasama dengan pemerintah atau ada haknya masyarakat kepada pemerintah untuk membantu pengolahan sumber daya tersebut, artinya memiliki saling berpengaruh atau mempengaruhi antara individu yang satu dengan yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, maka tidak lain masyarakat itu perlu saling membantu dengan alasan demi keberlangsungan kebaikan di area kehidupan yang ditempuh oleh masyarakat.

2.6.2. Ciri-ciri masyarakat

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
- d. Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan (Soekanto, 1983)

2.6.3. Syarat Fungsional Masyarakat.

- a. Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub- sistem organisme perilaku dan dengan dunia fisiko organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya (Soekanto, 1983)
- b. Fungsi integrasi hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan peranannya keseluruhan sistem.
- c. Fungsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan – sub – sistem kebudayaan

- d. Fungsi pencapaian tujuan. hal ini berhubungan dengan sistem sosial dengan aksi keperibadian. Dalam artian mencapai tujuan tujuan pada masyarakat, dan mobilitas masyarakat untuk mencapai tujuan tujuan tersebut.

Masyarakat yang berpengaruh besar terhadap kelangsungannya suatu ekonomi dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), yaitu pemerosesan tanaman coklat yang kedepannya sebagai daya pembiayaan pendapatan keluarga dan bisa atau mampu membeli kebutuhan sehari-hari supaya termiliki rasa bahagia di keluarga itu sendiri atas hasil dari sebuah penanaman coklat atau kakao, namun dalam kesemua itu tidak terlepas dari sebuah pendukung daripada lembaga yang ada bahkan udah menjadi hak atau kewenangan masyarakat daripada lembaga (Pemerintah)

2.7. Kerangka Berpikir.

Oleh sebab itu berdasarkan analisis yang ada dengan menempatkan adanya peran Pemerintah Desa (PEMDES) dan pengelolaan yang bagus sehingga petani dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam usaha tani coklat diharapkan akan tercapai produktivitas yang maksimal sehingga dapat meningkatkan mutu dan tingkat ekonomi di daerah penelitian. namun disini lain adanya peran Pemerintah Desa (PEMDES) sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu dalam kewenangan desa dan penyelenggaraan Pemerintah Desa (PEMDES) dalam Undang – undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, di situ sudah sangat jelas bahwa yang bertanggung jawab mengenai pemberdayaan masyarakat desa adalah Pemerintah Desa (PEMDES) setempat dan setiap warga desa wajib

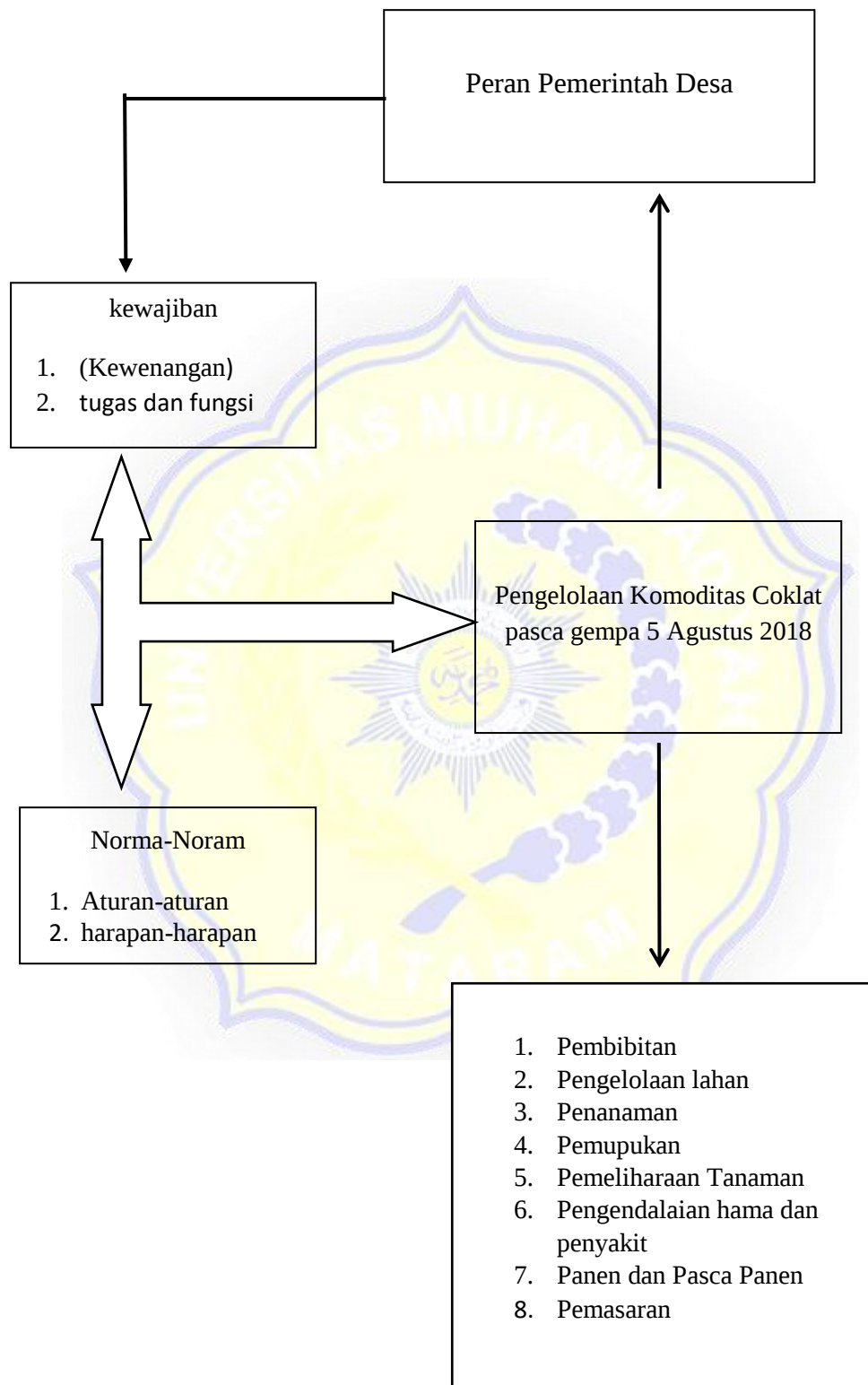
mendapat pemberdayaan terlebih khusus kelompok – kelompok di desa entah itu kelompok tani yaitu pertanian coklat atau kakao yang dimana salah satu tujuan dari pada Pemerintahan Desa(PEMDES) itu sendiri agar masyarakatnya tertunaikan hak-haknya masing-masing dalam rangka mensejahterakan masyarakat tersebut.

Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan kekuasaan, Kewenangan lebih baik pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu (Sutoro Eko, 2014:16). Sebuah peran pemerintah akan menghasilkan dukungan bagi individu maupun kelompok dalam bentuk adanya permasalahan atau peningkatan-peningkatan untuk masyarakat salah satunya peningkatan perekonomian masyarakat melalui penanaman sampai dengan penjualan pohon dan biji Coklat bahkan sampe dengan pengelolaan coklat pasca gempa dengan itu diartikan pemerintah memiliki kewajiban terhadap masyarakat yaitu kewenangan artinya ada sebuah hak untuk melakukan sesuatu, yang menjadi haknya dari pemikiran penulis adalah memberikan peran pemerintahnya desa dalam pengelolaan komoditas coklat pasca gempa, diantara pemerintah yang menjadi penopangnya adalah ada dinas perindustrian dan perdagangan, dinas perkebunan, dinas koperasi untuk memebrikan dukungan berupa bimbingan teknis dan bantuan sarana prasarana pekebun coklat, Sejalan dengan itu adanya aturan-aturan atau norma yang bertunjang dari asas pengaturan undang undang No.6 tahun 2014 tentang desa, ada daripada pemerintah

kemasyarakatan untuk mencapai suatu hasil yang berawal dari pengelolaan yaitu pengelolaan komoditas coklat pasca gempa dengan bertitik pada Pembibitan, Pengolahan lahan, Penanaman, Pemupukan, Pemeliharaan tanaman, Pengendalian hama dan penyakit, Panen dan pasca panen, Pemasaran dan lain sebagainya, berdasarkan UURI No 18 tahun 2004 ada bentuk aturan dalam pencapaian hak masyarakat untuk perkebunan khususnya perkebunan coklat.



gambar 1 .
Kerangka Berpikir



Sumber: Soekanto (2001:267).

2.8. Definisi Konseptual

berikut ini akan dipaparkan beberapa teori atau definisi-definisi yang akan menjadi pendukung lebih rinci dari proposal ini dan menjadi bahan pengetahuan penulis.

- a. peran adalah bentuk dari sebuah pertanggungjawaban atas hal yang ditetapkan padanya dalam mencapai sebuah tujuan. didalam peran banyak sekali karakter-karakter yang dipegang untuk mencapai sebuah tujuan yang satu dengan yang lain, salah satunya yaitu peran lembaga atau peran dalam ran sosial tentunya mendukung keberadaanya. Salah satunya itu adalah peran pemerintah, entah pemerintah daerah atau pemerintah desa.
- b. Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisional dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.
- c. peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- d. Pemerintah Desa (PEMDES) merupakan bentuk dari sebuah kepemimpinan yang memiliki tujuan yaitu membentuk masyarakat yang berkembang dari segi sosial baik lebih khususnya ekonomi dan pendidikan. masalah ekonomi berarti lebih ke-kesejahteraan masyarakat dalam artian memiliki pendapatan agar bisa bertahan hidup keluarganya,

lalu dalam pendidikan berarti lebih kepemahaman masyarakat dalam artian memiliki pemikiran yang baik untuk memecahkan sebuah masalah atau subangkan pemikiran-pemikiran.

- e. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsitasni penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
- f. Peran Pemerintah Desa adalah suatu peroses yang sudah menjadi tanggung jawab pemimpin disuatu daerah (Desa, Kabupaten, Kota) baik itu lembaga, organisasi, dinas atau badan, yang memiliki tujuan.

2.9. Definisi Oprasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

- 1. kewajiban
 - a. Kewenangan
 - b. Tugas dan fungsi
- 2. Norma-Noram
 - a. Aturan-aturan
 - b. Harapan-harapan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Dalam metode yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi peneliti deskriptif kualitatif perlu menciptakan konsep-konsep ilmiah, sekaligus berfungsi dalam mengadakan suatu spesifikasi mengenai gejala-gejala fisik maupun sosial yang dipersoalkan. Hasil penelitiannya difokuskan untuk memberikan gambaran keadaan dari objek yang diteliti (Moh. Pabunda Tika, 2005:4).

Dilihat dari subjek penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian populasi karena responden penelitian ini adalah beberapa petani kakao di Desa Teniga, Kecamatan Tanjung. Penelitian dilakukan pada beberapa Kepala Rumah Tangga di Desa Teniga yang mengusahakan perkebunan kakao yang diresponen. Maka dalam penelitian kualitatif itu didasarkan pada informasi yang didapat lalu dipaparkan sesuai fakta yang ada untuk memuat dalam penelitian ini.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dan masyarakat Desa Teniga, Karena peneliti melihat untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sangat kurang

dalam Sumber Daya Alam (SDA) khususnya pada pertumbuhan coklat atau kakao, sesuai peneliti ketahwi bahwa bisanya perkebunan coklat ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat disana semenjak sebelumnya terjadi gempa lalu ada dukungan dari Pemerintah Desa (PEMDES)

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui wawancara. Maka pihak yang menjadi responden melalui wawancara untuk mendapatkan data yang jelas yaitu pihak yang ada di Pemerintah Desa (PEMDES) dan masyarakat yang memiliki perkebunan coklat atau kakao.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi yang berhubungan dengan masalah penelitian (instansi terkait). seperti propil desa, letak georafis dan lain sebagainya, data-data yang telah diperoleh dari tahun ke tahun, untuk membuktikan dan melihat antara kurang dan lebihnya hasil dari pengelolaan coklat.

3.4. Metode Pengumpulan Data

3.4.1. Observasi

Penggunaan metode observasi ini berlaku pada sesuatu yang di ketahui ketika peneliti menuju pada lokasi penelitian guna mengetahui lebih

lanjut yang akan dipaparkan, sehingga lebih mudah peneliti menggali lebih dalam lagi permasalahan yang ada, khususnya observasi terhadap desa Teniga dan lingkup Pemerintah Desa (PEMDES), bahkan nanti terdapat sebuah web yang dimiliki oleh pihak pemerintahan desa webnya (teniga-lombokutra.desa.id)

3.4.2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab searah yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang penulis peroleh dari pihak Pemerintah Desa (PEMDES) dan pemilik perkebunan coklat, dengan tidak terlepas dari pengajuan pertanyaan yang mudah dipahami oleh penjawab agar hasil dari informasi tersebut jelas dan terarah.

3.4.3. Dokumentasi

Pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya, dan juga metode dokumentasi adalah, suatu metode yang dilakukan dengan jalan mencatat data-data atau catatan resmi dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian ini, dengan demikian penggunaan dokumentasi ini untuk memperoleh data-data tertulis berupa, profil dan luas geografis, sejarah berdirinya yang terdapat di Pemerintah Desa (PEMDES) maupun masyarakat Desa Teniga Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

1.5. Teknik Penentuan Narasumber

Dalam menentukann narasumber untuk penelitian ini agar mendukung hasilnya maka penulis mengambil cara dengan *Purpose*

Sampling adalah salah satu bentuk teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya yaitu cara peneliti untuk mendapat informasi sesuai keinginan peneliti karena sudah tau keadaan lokasi peneliti tersebut.

1. Informan Kunci, Yaitu orang-orang yang sangat memahami atau membidangi permasalahan yang diteliti, informasi dipenelitian ini adalah aparat desa, diantaranya ada kepala desa, sekertaris desa, bagian urusan perencanaan, bagian urusan tata usaha dan umum, bagian seksi pemerintahan, bagian pelayanan dan pemerintah desa pada bagian kesejahteraan.
2. Informan biasa, adalah orang yang dianggap pendukung informasi yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti yaitu masyarakat.

Maka narasumber yang peneliti ambil untuk *purpose Sampling* itu terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, bagian urusan perencanaan, bagian urusan tata usaha dan umum, bagian seksi pemerintahan, bagian pelayanan, pemerintah desa pada bagian kesejahteraan, dan masyarakat petani kakau yang terkena dampak gempa 5 Agustus 2018 di beberapa dusun Desa teniga Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang akan lebih detail untuk mendapatkan informasi dan kurang lebihnya akan ditambahkan jika ada informasi dari web Kantor desa.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala desa (1 orang)
2. Bagian seksi pemerintahan (1 orang)
3. Bagian kesejahteraan (1 orang)

4. Masyarakat petani kakau (6 orang)

jadi, Penentuan narasumber untuk sebuah informasi bagi peneliti itu sebanyak (9 orang).

1.6. Teknik Analisis Data

Data analisis yang telah terkumpul dalam tahap pengumpulan data perlu dilihat terlebih dahulu, apabila belum lengkap segera dilengkapi. Tujuan pengolahan data adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan menyajikan dalam susunan yang baik dan rapi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif untuk menjelaskan berbagai peran Pemerintah Desa (PEMDES) dan karakteristik ekonomi petani dalam pendapatan terhadap kakao di Desa Teniga. Dengan demikian analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data yang bersumber dari lapangan, catatan obsevasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang di teliti dan menyajikan suatu temuan bagi orang lain. Data yang terkumpul di analisa dengan menggunakan metode induktif. Hadi Sutrisno mengemukakan bahwa, “metode induktif adalah analisa data yang berangkat dari fakta-fakta dan peristiwa yang bersifat kasus kemudian di lakukan generalisasi dengan kesimpulan yang bersifat umum”

Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Bentuk dari penelusuran dilapangan kemudian dirangkum sehingga menemukan suatu hal yang pokok dan yang penting

sesuai dengan tema penelitian itu, bahkan ketika direduksi itu memberikan pemahaman yang lebih luas sehingga peneliti lebih mudah menemukan data-data sehingga mudah diperoleh dan di perlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan di analisis sesuai dengan tinjauan yang diinginkan, kemudian data yang disajikan harus jelas agar mudah dibaca dan dipahami.

3. Menarik Kesimpulan

Setiap hasil penelitian harus memiliki kesimpulan kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar dari pembahasan, secara umum kesimpulan menunjukkan jawaban atas tujuan yang telah dikekumakan dalam pendahuluan. Jawaban akhir dalam kesimpulan harus memiliki dasar yang kuat karena seringkali pembaca laporan penelitian tidak membaca seluruh isi dan peroses penelitian karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu peneliti dituntut untuk menyajikan kesimpulan secara baik agar tidak memberikan penafsiran yang keliru bagi pembaca (Suliyanto, 2006)